

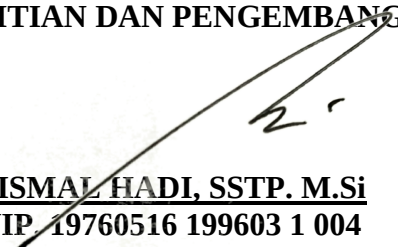
KATA PENGANTAR



uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2019 harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bapelitbang selama tahun 2019. Diharapkan LKIP Bapelitbang ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi di Tahun 2019. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kota Bukittinggi.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**


RISMAL HADI, SSTP. M.Si
NIP. 19760516 199603 1 004

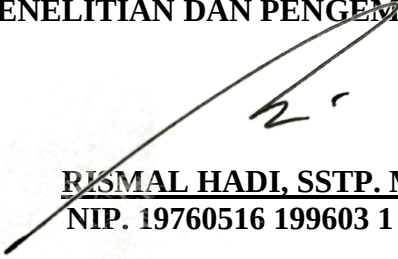
DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	
Latar belakang.....	1
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi bapelitbang	2
Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2016-2021	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja	14
Realisasi Keuangan.....	22
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	26
Saran	26
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

 sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kota Bukittinggi, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbang Kota Bukittinggi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Bapelitbang dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kota Bukittinggi, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, LKIP Tahun 2018 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bapelitbang Kota Bukittinggi dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap sasaran tersebut, terdapat indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Penyerapan anggaran Tidak Langsung pada tahun 2019 sebesar 95,05%% dari total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan realisasi Belanja langsung sebesar 84,22 %. Sehingga total realisasi belanja Bapelitbang Kota Bukittinggi pada tahun 2019 adalah sebesar 90,08% dari anggaran yang tersedia

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**


RISMAL HADI, SSTP. M.Si
NIP. 19760516 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3 Isu Strategis SKPD	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2016-2021.....	7
2.2 Perjanjian Kinerja Bapelitbang.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2 Realisasi Keuangan.....	24
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

ada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

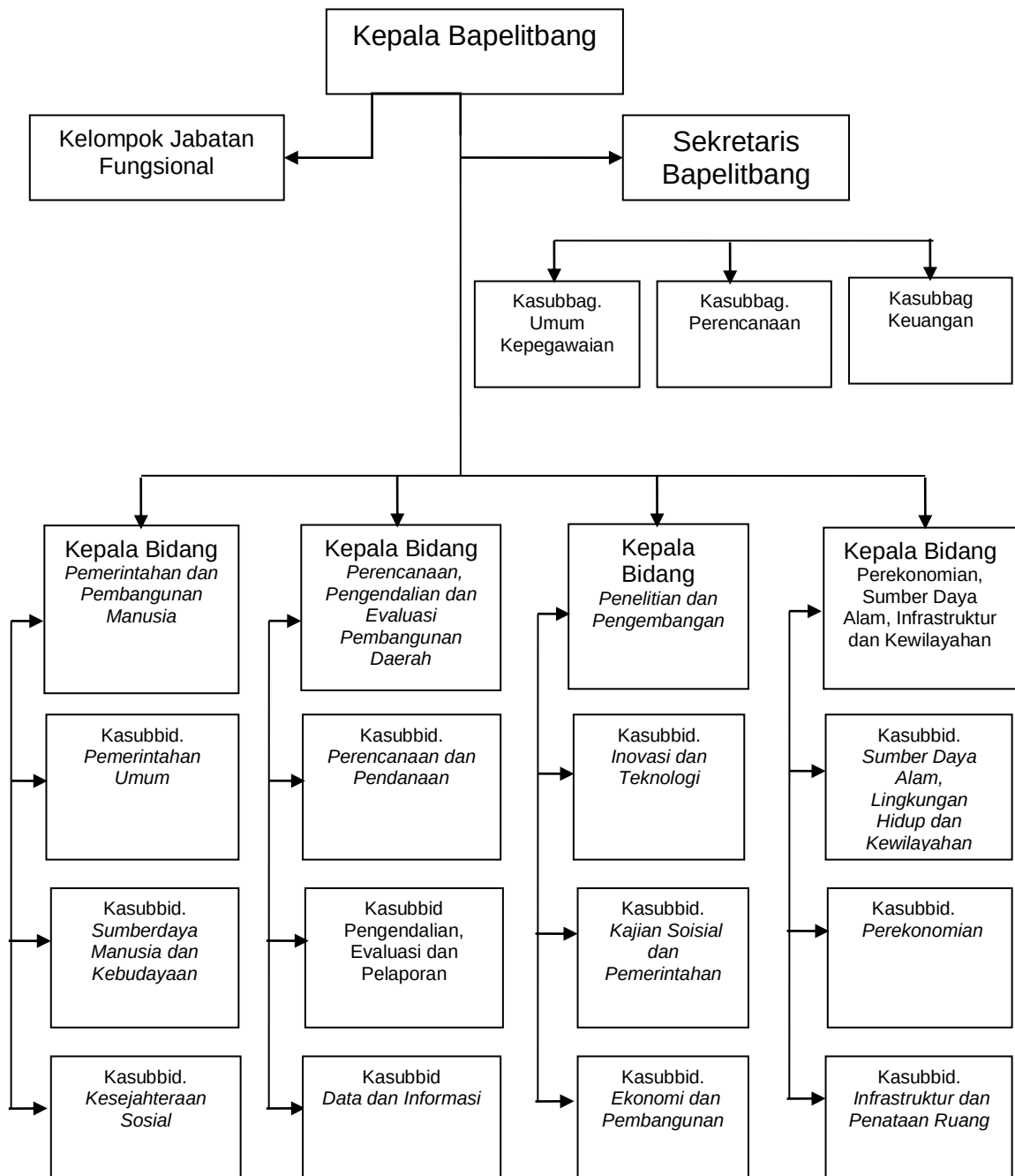
Sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi serta Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kota Bukittinggi yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Telah ditegaskan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.
2. Pelaksana Kebijakan Teknis bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan
3. Pelaksana Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan Administrasi Badan dan Pelaksana Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Seesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu oleh Sekretaris serta 4 (empat) Bidang yang membantu menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Struktur Organisasi Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Bapelitbang Kota Bukittinggi



1.3 Isu Strategis SKPD

Tingkat kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi pada tahun 2019 dikategorikan berhasil terkait dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dokumen perencanaan, baik perencanaan jangka panjang maupun perencanaan jangka menengah dan tahunan, namun hal ini perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Untuk dapat meningkatkan kinerja kedepan, Bapelitbang akan menemui tantangan dan kendala. Adapun tantangan dan kendala tersebut antara lain adalah :

1. Keterbatasan anggaran.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor yang akan sangat mempengaruhi pencapaian tingkat kinerja Bapelitbang, dimana anggaran merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang akan mendukung pencapaian kinerja.

2. Personil

Jumlah personil pada Bapelitbang saat ini dinilai masih kurang dibandingkan dengan beban tugas yang diemban oleh Bapelitbang sesuai dengan hasil analisa Jabatan.

3. Jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat pendek dan beban tugas Bapelitbang yang cukup berat menjadi tantangan dalam pencapaian target kinerja.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja maka yang menjadi issue utama dalam pencapaian kinerja Bapelitbang adalah peningkatan kualitas perencanaan OPD. Capaian untuk indikator kinerja terkait kualitas perencanaan belum tersedia pada 2019, maka tahun 2019 merupakan titik tolak pengukuran kinerja indikator tersebut. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Bapelitbang dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah terkait:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan OPD se-Kota Bukittinggi
2. Penguatan fungsi pengendalian dokumen perencanaan OPD
3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi
4. Penguatan kapasitas kelembagaan Bapelitbang serta kapasitas Sumber Daya Aparatur Bapelitbang
5. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

istematika penyajian Laporan Kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2019 meliputi Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2016 - 2021.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

A. Capaian Kinerja

Menjelaskan pencapaian kinerja Bapelitbang dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran strategis untuk Tahun 2019 dengan analisis kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPELITBANG Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja juga memberikan target (quantitative objectives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi penetapan visi/misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2019 telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

2.1 RENCANA STRATEGIS BAPELITBANG TAHUN 2016-2021

Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, Bapelitbang Kota Bukittinggi lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya kota secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan

diformasikannya tujuan strategis dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur, rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tujuan adalah sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun . Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.
- Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.
- Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
- Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang ditetapkan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Berdasarkan visi dan misi Walikota Bukittinggi, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan 4(empat) sasaran.

a. Tujuan :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif
2. Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan
3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

b. Sasaran :

Sasaran strategis Bapelitbang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode

secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun.

Sasaran strategis Bapelitbang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Bapelitbang dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Bapelitbang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga tercapai.

Sasaran dan Program Bapelitbang Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut:

TUJUAN 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif

untuk mencapai tujuan ini dijabarkan kedalam sasaran:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.	- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	100%
		- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	100%
		- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	100%

TUJUAN 2: Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan

untuk mencapai tujuan ini dijabarkan kedalam sasaran:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	- Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	100%
		- Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi Daerah Tetangga dan Nasional	100%
2	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	- Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%

TUJUAN 3: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

untuk mencapai tujuan ini dijabarkan kedalam sasaran:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	- Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunanMeningkatkan	25

2.2 PERJANJIAN KINERJA BAPELITBANG

Perjanjian Kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2019 dijabarkan kedalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Bapelitbang Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	100%	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	95.000.000,00
				Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	83.050.000,00
				Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	115.447.922,88
				Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	42.182.000,00
				Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	201.500.000,00
				Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	197.964.000,00
				Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	127.936.500,00
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	100%	Penyusunan KLHS RPJMD	5.747.500,00
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang			

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
2	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	100%	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK dan Tugas Pembantuan	99.600.000,00
				Review dan Sinkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi	17.800.000,00
				Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	21.929.300,00
				Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	49.900.000,00
				Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	224.814.000,00
				Fasilitasi tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	94.369.500,00
				Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	31.655.600,00
				Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat	70.946.500,00
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional	100%	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	100.227.200,00
				koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	70.000.000,00
				Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	68.276.500,00
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	125.075.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	106.667.500,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
3	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah	9.007.200,00
				Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	162.450.000,00
				Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	90.213.000,00
4	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunanMeningkatkan	25	Penguatan Inovasi Daerah	237.738.065,00
				Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kota Bukittinggi	104.723.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

 Akuntabilitas Kinerja Bapelitbang merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan selama tahun 2019 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2019.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

 Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2019 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Bapelitbang tahun 2019 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbang dengan Walikota Bukittinggi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Pada Perjanjian Kinerja telah dirumuskan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang didukung oleh 9 (sembilan) program dan 41 kegiatan. Analisis dan evaluasi kinerja terhadap sasaran diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja sebagai bahan pengambil keputusan manajemen Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan khususnya dan Pemerintah Kota Bukittinggi pada umumnya untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja



encapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1.1.1 Sasaran Strategis “terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan” dengan indikator sasaran Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek. Pencapaian kinerja terhadap sasaran ini diukur dengan cara : Membandingkan jumlah kegiatan usulan yang disepakati masyarakat melalui musrenbang kelurahan yang diakomodir pada RKPD dibandingkan dengan jumlah usulan kegiatan masyarakat yang yang disepakati dan diusulkan melalui musrenbang kelurahan.

$$\begin{array}{l} \text{\% usulan masyarakat yang diakomodir} \\ \text{melalui Musrenbang pada Dokumen} \\ \text{Perencanaan Jangka Pendek} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{jumlah kegiatan usulan yang disepakati masyarakat melalui} \\ \text{musrenbang kelurahan yang diakomodir pada RKPD} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{jumlah usulan kegiatan masyarakat yang yang disepakati dan} \\ \text{diusulkan melalui musrenbang kelurahan} \end{array}}$$

Total usulan masyarakat yang ditampung pada RKPD Tahun 2019 adalah sebanyak 245 usulan, sedangkan total usulan masyarakat pada musrenbang adalah sebanyak 267 usulan, sehingga persentase usulan masyarakat yang ditampung pada RKPD 2019 adalah sebesar 90,74%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	100%	90,74%	90,74%

3.1.1.2 Sasaran Strategis “Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan” dengan indikator sasaran :

- Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek.

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah program/kegiatan pada RKPD yang memiliki keselarasan dengan sasaran kinerja dibandingkan dengan jumlah program/kegiatan yang ada pada RKPD

$$\begin{array}{l} \text{\% Keselarasan Dokumen} \\ \text{Perencanaan Jangka Panjang,} \\ \text{Jangka Menengah, dan Jangka} \\ \text{Pendek} \end{array} = \frac{\text{jumlah program/kegiatan pada RKPD yang memiliki} \\ \text{keselarasan dengan sasaran kinerja}}{\text{jumlah program/kegiatan yang ada pada RKPD}}$$

Total Program yang ada pada RPJMD kota Bukittinggi 2016-2021 adalah sebanyak 206 Program sedangkan program yang diakomodir pada RKPD tahun 2019 adalah sebanyak 158 Program ,dimana semua program yang ada pada RKPD tahun 2019 terakomodir pada RPJMD Tahun 2016-2021. Dengan demikian tingkat keselarasan RKPD tahun 2019 adalah sebesar 100%

- b. Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah program prioritas Propinsi dan Nasional yang dituangkan dalam RKPD dibandingkan dengan Jumlah Program Prioritas Propinsi dan Nasional.

$$\begin{array}{l} \text{\% Keselarasan Dokumen Perencanaan} \\ \text{Daerah dengan Dokumen Perencanaan} \\ \text{Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional} \end{array} = \frac{\text{jumlah program prioritas Propinsi dan Nasional yang} \\ \text{dituangkan dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program Prioritas Propinsi dan Nasional.}}$$

Dalam RKP tahun 2019, telah ditetapkan 5 Prioritas Pembangunan yaitu :

1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif
4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.

Dalam RKPD Kota Bukittinggi tahun 2019 turut mendukung prioritas nasional dalam bentuk program kegiatan, antara lain mendukung prioritas nasional dalam hal :

1. penanggulangan kemiskinan
2. peningkatan nilai tambah ekonomi dalam bidang pertanian
3. pemantapan ketahanan pangan
4. mewujudkan stabilitas keamanan dalam bentuk kesuksesan Pemilu dan Pemilukada

dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa prioritas nasional dan propinsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, semuanya diakomodir dalam RKPD Tahun 2019.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan	Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	100%	100%	100%
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional	100%	100%	100%

3.1.1.3 Sasaran Startegis “Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah elemen data yang tersedia dengan lengkap pada dokumen perencanaan (RKPD) dibandingkan dengan seluruh jumlah elemen data yang dibutuhkan oleh RKPD

$$\frac{\text{\% ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan}}{\text{jumlah elemen data yang tersedia dengan lengkap pada dokumen perencanaan (RKPD)}} = \frac{\text{jumlah elemen data yang dibutuhkan oleh RKPD}}{\text{jumlah elemen data yang tersedia dengan lengkap pada dokumen perencanaan (RKPD)}}$$

Dalam penyusunan RKPD, dibutuhkan beberapa elemen data pendukung antara lain adalah :

1. Hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan
2. Permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah
3. Arah kebijakan nasional dan propinsi
4. Kondisi ekonomi daerah
5. Proyeksi keuangan daerah

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2019, semua elemen data yang dibutuhkan tersebut secara keseluruhan dapat terpenuhi.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%

3.1.1.4 Sasaran Startegis “Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan” dengan indikator Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan.

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan program/ kegiatan strategis dibandingkan dengan jumlah hasil penelitian yang dilakukan

$$\frac{\text{\% hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan}}{\text{jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan program/ kegiatan strategis}} = \frac{\text{jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan program/ kegiatan strategis}}{\text{jumlah hasil penelitian yang dilakukan}}$$

Jumlah hasil penelitian pada tahun 2019 sebanyak 9 penelitian, dari hasil penelitian tersebut seluruhnya dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan , sehingga persentase pencapaian hasil penelitian adalah 100%, namun jika dibandingkan dengan target jumlah penelitian yang harus dilakukan pada tahun 2019, realisasi penelitian di tahun 2019 tidak mencapai target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan	25	9	36%

Pada Tahun 2019 telah disusun dokumen perencanaan sebanyak 7 (tujuh) dokumen perencanaan yaitu:

1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi
2. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah
3. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi
4. Penyusunan KLHS RPJMD
5. Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi
6. Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi
7. Review dan Sinkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi

Semua dokumen perencanaan tersebut dapat disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu. Regulasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut secara teknis adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian kinerja untuk sasaran strategis Perencanaan Pembangunan telah disusun secara Prosedural mencapai 100%.

Dokumen perencanaan yang disusun pada tingkat kota pada tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu dokumen perencanaan tahunan (RKPD) juga merupakan bahan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang nantinya juga merupakan pedoman dalam menyusun APBD pada tahun berikutnya.

Dari 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang mendukung sasaran strategis perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terintegrasi, maka diperoleh realisasi target capaian kinerja mencapai 97,19 % dari target indikator sasaran 100%.

Untuk kegiatan penyusun KLHS RPJMD pada tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan dan menghasilkan dokumen KLHS. Hal ini disebabkan sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang menfokuskan pada analisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) bahwa analisis dilakukan terhadap ketercapaian indikator dengan kondisi terakhir tahun yaitu 2019 sebagai input program dan kegiatan untuk RPJMD 2021-2025. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019 karena data indikator TPB / SDG's sampai dengan tahun 2019 tidak bisa dipantau sehingga dikhawatirkan analisis KLHS tidak akan menghasilkan substansi kajian yang mendukung skenario pembangunan sebagai input RPJMD 2021-2025.

Untuk kegiatan Review dan Sinkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi tidak dilaksanakan dan menghasilkan dokumen. Hal ini disebabkan oleh adanya arahan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Nomor : UM.01.11/BPPW-Sumbar/422 tentang Pemberitahuan Penyusunan SPKP dan RPIJM, dimana Kabupaten Kota tidak lagi melakukan penyusunan Dokumen RPIJM, namun melakukan Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman(SPKP) yang berbasis Web melalui Sistem Informasi SPKP yang meliputi data dan Informasi yang berbentuk literal (isian Tabuler) maupun Spasial.

3.1.2 Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017 s/d 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran			
				2017	2018	2019
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	90%	98%	90,74%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran			
				2017	2018	2019
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	90%	90%	100%
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	90%	90%	
2	Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Keselarasn Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	80%	90%	100%
			Keselarasn Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi ,Daerah Tetangga dan Nasional	80%	100%	100%
		Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	80%	90%	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah	20	20	9

Sasaran strategis Perencanaan Pembangunan Daerah telah disusun secara Prosedural pada Tahun 2019 dalam kondisi tetap jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sama-sama hampir mencapai 100 %, hal ini disebabkan karena Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya bisa dilaksanakan sesuai rencana.

3.1.3 Analisis Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 dibandingkan dengan Target Kinerja yang ada pada Renstra

Realisasi Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja yang ada pada Renstra Bapelitbang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Target Kinerja Sasaran Strategis Pada Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
				2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	80%	90%	100%	90,74%
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	80%	90%	100%	100%
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	80%	90%	100%	100%
2	Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	80%	90%	100%	100%
			Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	80%	90%	90%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
				2016	2017	2018	2019
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah	10	15	20	9

SUMBER : Data Realisasi 2016,2017,2018,2019 dan RPJMD

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2019 dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor yang dijelaskan pada analisis keberhasilan dan kegagalan dibawah ini.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

- Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kota Bukittinggi terhadap pelaksanaan program kegiatan;
- Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya:

- Kurangnya SDM Perencana
- Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
- Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

- Mengusulkan pemenuhan formasi JFT Perencana dan mengoptimalkan pegawai Non PNS
- Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian dan monitoring
- Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

- d. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- f. Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang Kota Bukittinggi didukung oleh ketersediaan Sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya sarana prasarana kantor. Pada tahun 2019 personil Bapelitbang berjumlah 37 orang dengan 21 pejabat struktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Bapelitbang, Sekretaris dan 4 Kepala Bidang dan 15 Kasubbag dan Kasubbid serta 13 fungsional Umum. Dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Bapelitbang dimana ketersediaan fungsional umum sangat sedikit sekali, untuk setiap pejabat struktural eselon IV hanya terdapat 1 orang fungsional umum yang menyebabkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan tepat waktu sangat kewalahan sehingga Bapelitbang sangat sering melaksanakan lembur-lembur diluar jam kantor untuk mengejar penyelesaian kegiatan sesuai waktu yang ditentukan.

Ketersediaan sumberdaya sarana prasarana kantor Bapelitbang sudah cukup baik, baik itu ketersediaan peralatan maupun perlengkapan kantor yang sangat berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan dan pencapaian target kinerja Bapelitbang secara umum.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2019 Bapelitbang menyelenggarakan Urusan Perencanaan Pembangunan yang didukung oleh 9 program dengan 43 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja dinyatakan dengan predikat sebagai berikut :

Tabel 3.4
Predikat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT	CAPAIAN KINERJA SASARAN
1	100 %	Sangat Baik	3
2	85 % s/d < 100 %	Baik	1
3	70 % s/d < 85 %	Sedang	-
4	0 % s/d < 70 %	Kurang Baik	-

Empat sasaran strategis ditentukan oleh capaian tujuh indikator sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja utama masing-masing indikator. Dari tujuh indikator tersebut 6 indikator berpredikat sangat baik karena memperoleh capaian kinerja 100% Penjabaran lebih lanjut kondisi pencapaian indikator sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Predikat **Sangat Baik** , dicapai oleh indikator :

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah “Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan” dengan nilai capaian 100 % yang dicapai dengan kegiatan:

1. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah mencapai 100%

b. Predikat **Baik** ($85\% \leq 100\%$) dicapai oleh indikator:

Capaian ber predikat baik dicapai oleh indikator lainnya antara lain oleh kegiatan :

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dengan capaian 95%
2. Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi dengan capaian 94%
3. Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga dengan capaian 90%
4. Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi dengan capaian 89%
5. koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan capaian 93%
6. Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan capaian 85%
7. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan capaian 90%
8. Fasilitasi tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dengan capaian 90%
9. Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kota Bukittinggi dengan capaian 90%

3.2 REALISASI KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Bapelitbang didukung oleh pendanaan baik berupa Belanja Pegawai maupun belanja penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi tahun 2019. Rincian anggaran belanja dan realisasinya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5
Rincian Belanja dan Realisasinya

Kode	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	
				RP	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.146.822.606	3.941.475.004	205.347.602	95,0
00.00	Belanja Pegawai	4.146.822.606	3.941.475.004	205.347.602	95,0
00.00	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.354.822.606	2.235.878.754	118.943.852	94,9
00.00	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.792.000.000	1.705.596.250	86.403.750	95,2
	Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	4.146.822.606	3.941.475.004	205.347.602	95,0
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.520.463.428	2.964.960.297	555.503.131	84,2
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	879.533.140	807.458.041	72.075.099	91,8
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.750.000	1.994.000	756.000	72,5
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.300.000	43.921.465	7.378.535	85,6
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	135.000.000	111.926.824	23.073.176	82,9
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	169.000.000	168.859.000	141.000	99,9
01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000	9.318.200	681.800	93,2
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	14.999.700	12.528.275	2.471.425	83,5

Kode	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	
				RP	%
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.701.650	20.404.100	9.297.550	68,7
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	474.100	440.000	34.100	92,8
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	16.490.000	11.738.000	4.752.000	71,2
01.18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	375.000.000	353.389.449	21.610.551	94,2
01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	59.196.480	59.188.728	7.752	100,0
01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	15.621.210	13.750.000	1.871.210	88,0
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.710.000	77.689.550	9.020.450	89,6
02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	66.710.000	61.810.000	4.900.000	92,7
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	15.879.550	4.120.450	79,4
15	Program pengembangan data/informasi	90.213.000	41.778.806	48.434.194	46,3
15.06	Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	90.213.000	41.778.806	48.434.194	46,3
18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	139.956.500	123.391.829	16.564.671	88,2
18.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	100.227.200	94.084.779	6.142.421	93,9
18.06.	Review dan Sinkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi	17.800.000	10.842.400	6.957.600	60,9
18.07	Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	21.929.300	18.464.650	3.464.650	84,2

Kode	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	
				RP	%
19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	274.714.000	250.271.451	24.442.549	91,1
19.12	Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	49.900.000	47.017.787	2.882.213	94,2
19.13	Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	224.814.000	203.253.664	21.560.336	90,4
21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.139.885.123	907.149.704	232.735.419	79,6
21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	95.000.000	65.115.981	29.884.019	68,5
21.14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	83.050.000	71.914.928	11.135.072	86,6
21.15	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah	9.007.200	8.940.700	66.500	99,3
21.16	Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	115.447.923	87.937.606	27.510.317	76,2
21.17	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	42.182.000	34.347.655	7.834.345	81,4
21.18	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK dan Tugas Pembantuan	99.600.000	88.820.935	10.779.065	89,2
21.19	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	162.450.000	130.111.239	32.338.761	80,1
21.20	Penyusunan KLHS RPJMD	5.747.500	5.737.500	10.000	99,8
21.21	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	201.500.000	179.599.750	21.900.250	89,1
21.22	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	197.964.000	161.260.618	36.703.382	81,5
21.23	Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	127.936.500	73.362.792	54.573.708	57,3
22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	138.276.500	123.263.121	15.013.379	89,1
22.04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	70.000.000	65.426.796	4.573.204	93,5

Kode	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	
				RP	%
22.09	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	68.276.500	57.836.325	10.440.175	84,7
23	Program perencanaan sosial dan budaya	322.046.600	279.990.020	42.056.580	86,9
23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	125.075.000	112.533.887	12.541.113	90,0
23.05.	Fasilitasi tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	94.369.500	84.469.640	9.899.860	89,5
23.06	Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	31.655.600	25.468.053	6.187.547	80,5
23.07	Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat	70.946.500	57.518.440	13.428.060	81,1
23.08	Koordinasi Pelaksanaan rencana Aksi Daerah Pencegahan & Pemberantasan Korupsi	-	-	-	
26	Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	449.128.565	353.967.775	95.160.790	78,8
26.01	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	106.667.500	88.190.377	18.477.123	82,7
26.02	Penguatan Inovasi Daerah	237.738.065	171.096.296	66.641.769	72,0
26.03	Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kota Bukittinggi	104.723.000	94.681.102	10.041.898	90,4

Dari tabel diatas terlihat bahwasanya Bapelitbang merupakan SKPD yang tidak memiliki sumber pendapatan yang bersumber dari pajak maupun retribusi. Pada tahun 2019 ini Bapelitbang mengelola Anggaran seluruhnya sebesar Rp7.667.286.033,88- (Tujuh Milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah delapan puluh delapan sen) dan terealisasi sebesar Rp6.906.435.301 (Enam Milyar sembilan ratus enam juta empat

ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah) dengan capaian keuangan 90,08%. Rincian belanja Bapelitbang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak langsung merupakan belanja Pegawai berupa pembayaran gaji pegawai, tunjangan, iuran jaminan kesehatan dan jaminan kematian yang diberikan kepada pegawai Bapelitbang setiap bulannya. Belanja tidak langsung yang dikelola Bapelitbang adalah sebesar Rp4.146.822.606,- dengan realisasi sebesar Rp3.941.475.004,- dan capaian kinerja keuangan yang sangat baik yaitu sebesar 95,05%.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Bapelitbang yang dikelola untuk penyelenggaraan program dan kegiatan dialokasikan sebesar Rp3.520.463.427,88,- dengan realisasi sebesar Rp2.964.960.297,- dengan capaian kinerja keuangan yang cukup baik yaitu sebesar 84,22%. Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa serta Belanja Modal

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

erdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan adanya komitmen Bapelitbang Kota Bukittinggi untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja. Secara ringkas seluruh capaian kinerja Bapelitbang pada Tahun 2019, telah memberikan gambaran dan dapat menjadi pertimbangan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

alam perencanaan pembangunan pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Bapelitbang Kota Bukittinggi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bapelitbang Kota Bukittinggi dengan memperkuat peran kelembagaan Bapelitbang Kota Bukittinggi sehingga Laporan Kinerja Bapelitbang Tahun 2020 dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
 - a. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana;
 - b. Kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;

- d. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Inovasi untuk pelaksanaan program kerja dan anggaran yang lebih efektif melalui perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran menjadi “bottom up” sesuai kebutuhan organisasi.
 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
 4. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bapelitbang Kota Bukittinggi untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Dari analisis pada Bab III, dapat dilihat bahwa 1 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dikategorikan dalam pencapaian indikator sangat baik, sedangkan 9 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dikategorikan pencapaian indikator baik.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

RISMAL HADI, SSTP. M.Si
NIP. 19760516 199603 1 004

LAMPIRAN

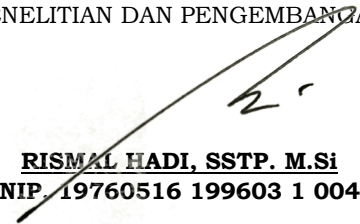
LAKIP BAPELITBANG KOTA BUKITTINGGI TA 2019
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2018		Realisasi Tahun 2017		Realisasi Tahun 2016		Kendala/Hambatan
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	100,00	83.050.000	100%	71.914.928	100,00	50.163.907	100%	124.047.490	100%	26.918.775	
			Penyelenggaraan musrenbang RKPD	100,00	95.000.000	100%	65.115.981	100,00	54.049.040					
			Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	100,00	42.182.000	100%	34.347.655	100,00	29.811.700	100%	61.656.825	0%	-	
			Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	100,00	115.447.923	100%	87.937.606	90,00	26.489.960	100%	108.702.825	0%	-	
			Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah	100,00	9.007.200	100%	8.940.700	-	2.847.000	100%	2.942.300	100%	3.713.750	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK dan Tugas Pembantuan	100,00	99.600.000	100%	88.820.935	100,00	47.605.430	100%	51.291.582	0%	-	
			Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	100,00	201.500.000	100%	179.599.750			100%	190.341.600	100%	149.023.550	
			Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	100,00	197.964.000	100%	161.260.618			100%	186.283.100	100%	141.420.375	
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	Penyusunan KLHS RPJMD	100,00	5.747.500	100%	5.737.500							
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang		-			0							

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2018		Realisasi Tahun 2017		Realisasi Tahun 2016		Kendala/Hambatan
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
2	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	Koordinasi Pelaksanaan rencana Aksi Daerah Pencegahan & Pemberantasan Korupsi	-	0		0	100,00	2.297.400	100%	53.296.075	0%	-	
			Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	100,00	224.814.000	100%	203.253.664	100,00	2.318.400					
			Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	100,00	49.900.000	100%	47.017.787	100,00	70.195.991	100,00	24.968.300,00			
			Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	100,00	68.276.500	100%	57.836.325	100,00	56.281.199					
			Review dan Sinkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi	100,00	17.800.000	100%	10.842.400	100,00	36.311.800	100,00	60.078.850,00			
			Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	100,00	21.929.300	100%	18.464.650	70,00	7.460.550					
			Fasilitasi tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	100,00	94.369.500	100%	84.469.640	100,00	128.603.626	98%	186.328.998			
			Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	100,00	31.655.600	100%	25.468.053	85,00	40.338.290					
			Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat	100,00	70.946.500	100%	57.518.440	90,00	75.165.442					
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi dan Daerah Tetangga	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100,00	70.000.000	100%	65.426.796	100,00	110.718.750	100%	97.041.186	100%	84.875.500	
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	100,00	100.227.200	100%	94.084.779	100,00	65.128.501	100,00	57.826.205,00			
			Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	100,00	125.075.000	100%	112.533.887	90,00	97.310.511	95%	134.615.730	100%	137.853.000	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2018		Realisasi Tahun 2017		Realisasi Tahun 2016		Kendala/Hambatan
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
3	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	100,00	162.450.000	100%	130.111.239	-	12.252.800	95%	27.690.125	0%	-	
			Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	100,00	90.213.000	100%	41.778.806	-	42.585.950			100%	84.875.500	
4	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunanMeningkatkan	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	100,00	106.667.500	100%	88.190.377	100,00	133.993.716	100%	27.300.200			
			Penguatan Inovasi Daerah	100,00	237.738.065	100%	171.096.296	100,00	47.010.445			100%	41.340.000	
			Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kota Bukittinggi	100,00	104.723.000	100%	94.681.102							

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


RISMAL HADI, SSTP. M.Si
NIP. 19760516 199603 1 004